

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hubungan diplomatik antara Indonesia dan Kamboja dimulai pada tahun 1950-an, keduanya pada saat itu baru saja merdeka dan memiliki kesamaan. Hal tersebut menjadikan nuansa saat mengawali hubungan persahabatan antara kedua negara. Kesamaan itu ialah keduanya memiliki sikap dan juga cara pandang yang tidak memihak juga menolak campur tangan negara asing dalam urusan dalam negeri masing-masing negara. Baik Indonesia maupun Kamboja, keduanya sangat anti terhadap penjajahan dan juga Neo-Imperialisme yang pada saat itu ditunjukkan oleh Amerika Serikat dan Uni Soviet.¹

Hubungan diplomatik antara Indonesia dan Kamboja diresmikan pada saat Indonesia dipimpin oleh Presiden Soekarno dan bahkan dilanjutkan oleh penerusnya yaitu Presiden Soeharto. Kamboja merupakan negara pertama di Asia Tenggara yang dikunjungi oleh Soeharto setelah beliau menjabat sebagai Presiden. Hal tersebut tentu merupakan suatu bukti dari keberlanjutan kebijakan Presiden Soekarno mengenai hubungan diplomatik antar kedua negara.² Kerja sama bilateral

¹ Nazaruddin Nasution and KBRI Phnom Penh, "Pasang Surut Hubungan Diplomatik Indonesia-Kamboja," in *Pasang Surut Hubungan Diplomatik Indonesia-Kamboja*(Phnom Penh, Indonesia: Kedutaan Besar Republik Indonesia Pnom Penh, 2002). h. 3

² Tubagus Arie, "Peran Indonesia Dalam Proses Penyelesaian KONFLIK Di ...," Jurnal UI, 2015, <http://lib.ui.ac.id/file?file=pdf/abstrak-20157000.pdf>.

antara Indonesia dan Kamboja sudah terjalin sejak lama, seperti yang tertuang pada undang-undang yang berisikan pembuatan perjanjian persahabatan Indonesia dan Kamboja yaitu undang-undang nomor 8 yang dikeluarkan pada 15 Oktober tahun 1960 yang telah ditandatangani pada tanggal 13 Februari tahun 1959.³

Tidak hanya itu, Indonesia dan Kamboja juga melakukan kerja sama dalam bidang pertahanan. Kamboja memiliki sejarah yang dipenuhi oleh konflik dalam negeri atau bahkan dengan negara lain sehingga hal tersebut mendorong Indonesia untuk berperan secara aktif guna menciptakan perdamaian di wilayah Kamboja. Hal ini ditandai dengan dikirimkannya Pasukan Garuda setelah keberhasilan Konferensi Paris tahun 1991 dengan tujuan untuk menyelesaikan masalah di Kamboja.⁴

Stabilitas keamanan kawasan merupakan hal yang sangat penting untuk pembangunan negara, kerja sama antar negara merupakan salah satu kunci dalam mewujudkan hal ini. Kerja sama antar negara juga memerlukan situasi juga kondisi yang menjamin demi terselenggaranya seluruh proses untuk mewujudkan tujuan tersebut. Maka dari itu, stabilitas keamanan kawasan memiliki kesamaan yang saling berkaitan, saling mempengaruhi, juga saling menentukan di dalamnya. Dampak yang ditimbulkan dari ancaman mencakup segala aspek sosial antara lain ideologi, pertahanan dan keamanan, politik, maupun ekonomi. Bentuk ancaman

³ Setjen DPR RI, "Situs Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia - Dpr RI," Dewan Perwakilan Rakyat, 2016, <https://www.dpr.go.id/jdih/index/id/1364>.

⁴ Nazaruddin Nasution and KBRI Phnom Penh, "Pasang Surut Hubungan Diplomatik Indonesia-Kamboja," in *Pasang Surut Hubungan Diplomatik Indonesia-Kamboja*(Phnom Penh, Indonesia: Kedutaan Besar Republik Indonesia Pnom Penh, 2002). h. 157

dewasa kini dapat dibagi menjadi tiga, yaitu: ancaman militer, ancaman non-militer, dan ancaman hibrida (Senjata kimia, biologi, radiasi, dan nuklir).⁵

Kerja sama militer antar negara negara ASEAN juga rutin dilakukan demi mendorong stabilitas keamanan di kawasan Asia Tenggara. Indonesia sendiri telah melakukan berbagai macam kerja sama militer antar negara negara anggota ASEAN lainnya contohnya seperti kerja sama militer dengan negara Kamboja, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Kerja sama militer ini antara lain melakukan patroli bersama antarnegara baik itu di darat, laut maupun di udara. Kehadiran TNI-AD dibawah naungan *United Nations* (UN) adalah suatu bentuk dukungan dari Bangsa Indonesia yang mana pada periode itu Kamboja sendiri belum bergabung menjadi negara anggota ASEAN.

Kamboja merupakan negara yang terakhir diterima untuk menjadi anggota organisasi ASEAN pada tanggal 30 April 1999.⁶ Sebagai sebuah entitas negara yang mengalami banyak pengalaman buruk serta kehancuran dalam perang saudara contohnya pada saat Peperangan Khmer Merah pada tahun 1970 sampai dengan 1975 hingga Kekejaman dari rezim PolPot pada tahun 1975 hingga 1979.⁷ Kamboja tentu memerlukan dukungan dari negara negara dibawah payung ASEAN. Seiring

⁵ *Doktrin TNI AD, Kartika Eka Paksi*. Jakarta: Markas Besar Angkatan Darat., 2017

⁶ “Kamboja, Negara Terakhir Yang Masuk ASEAN,” Google (Google), accessed February 24, 2021, <https://www.google.co.id/amp/s/amp.kompas.com/skola/read/2021/02/05/155528869/kamboja-negara-terakhir-yang-masuk-asean>.

⁷ Letkol Inf. Sum Samnang, “Kerjasama Militer Antara Kamboja Dan Indonesia Dalam Rangka Meningkatkan Keamanan Kawasan ASEAN,” *Karya Militer: Sekolah Dan Staf Komando Angkatan Darat*, 2006.

dengan hal tersebut, maka Indonesia secara masif membantu Kamboja dalam bidang pertahanan salah satunya melalui TNI-AD.

TNI-AD sendiri memiliki peran sebagai alat negara Indonesia yang menjalankan tugasnya berdasarkan dari kebijakan dan keputusan politik negara dalam bidang pertahanan di darat. Dalam penggunaannya, kekuatan TNI-AD pada Operasi Militer Selain Perang (OMSP) diselenggarakan dengan cara tugas operasi yang bersifat tempur ataupun non-tempur guna kepentingan pertahanan Republik Indonesia dan juga kepentingan nasional sesuai dengan undang-undang dan juga doktrin TNI-AD yang berlaku.⁸

Sedangkan RCAF merupakan Angkatan Bersenjata yang masih terbilang baru karena dibentuk pada tahun 1993 dan terdapat penggabungan anggota militer dari pemerintah Kamboja dan dua tentara perlawanan komunis; pasukan royalis dan juga pasukan Khmer Merah yang tergabung pada tahun 1999. Meski begitu, jumlah anggota militer pemerintahan Kamboja jumlahnya jauh lebih besar dibandingkan cabang lainnya juga sebagian staf yang mengikuti wajib militer. Karena jumlah anggota militer yang cukup besar ini, menyebabkan Kamboja harus mengurangi jumlah tentara mereka karena dianggap membebani sumber daya nasional.⁹

Pengurangan tersebut dilakukan dengan cara mencari dana dari negara-negara asing guna mengganti rugi tentara yang diberhentikan. Akan tetapi negara-negara asing menolak untuk memberi bantuan dana tersebut dengan proyek-proyek

⁸ *Ibid.*

⁹ Leonard C. Overton, "Justice of Cambodia," Encyclopædia Britannica (Encyclopædia Britannica, inc., 2019), <https://www.britannica.com/place/Cambodia/Justice#ref918130>.

yang dikorbankan dalam membangun kembali infrastruktur negara Kamboja yang selama ini telah menjadi negara dengan fokus utama bantuan asing.¹⁰

TNI-AD mulai bekerja sama dengan pihak RCAF di tahun 1992 pada masa transisi perdamaian Kamboja. Ruang lingkup dalam kerja sama bilateral di bidang pertahanan ini antara lain adalah kunjungan para pejabat militer, pertukaran informasi dan juga sekolah pendidikan, dan juga latihan bersama antara TNI-AD dan RCAF.

Gambar 1.1.1 Peringkat Kekuatan Militer di Kawasan Asia Tenggara Tahun 2020.



Sumber: Mata-Mata Politik

¹⁰ *Ibid.*

Dilihat dari data peringkat kekuatan militer menurut *Global FirePower*, Indonesia dan Kamboja memiliki kekuatan militer yang cukup berbanding terbalik. Kekuatan militer Indonesia berada di peringkat nomor satu sedangkan militer Kamboja berada di peringkat ke-9 dari 10 peringkat yang ada. Intens nya kerja sama militer ini dapat memberi tanda bahwa Indonesia sebagai dalam mewujudkan "tetangga baik" yang berada dibawah organisasi ASEAN mau memberi bantuan terhadap pihak Kamboja terkait bidang pertahanan dengan mengenyampingkan kekuatan militer yang dimiliki Kamboja dan hal ini dilakukan seiring dengan tujuan awal dibentuknya ASEAN guna terciptanya rasa aman dan damai di kawasan.

1.2 Rumusan Masalah

Dalam upaya membangun kembali negara Kamboja pasca perang dingin, Kamboja tentu memerlukan bantuan juga pembinaan baik dari segi doktrin, peralatan, dan sebagainya. Ideologi serta kepentingan nasional kedua negara yang berbeda jelas dapat menjadi tantangan, maka penelitian ini mencakup bagaimana pelaksanaan kerja sama militer antara TNI-AD dan RCAF baik dalam bidang pendidikan militer, dan kunjungan perwira tinggi dari masing masing pihak dan bagaimana kedua negara mengatasi perbedaan mereka pada periode waktu tahun 1992 sampai dengan 2020. Berdasarkan uraian yang sudah dipaparkan sebelumnya, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Mengapa kerja sama militer antara TNI-AD dan RCAF perlu diadakan?
2. Apa saja pencapaian utama dari kerja sama militer antara TNI-AD dan RCAF?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini tentu memiliki tujuan serta manfaat dan kegunaannya terkait topik penelitian yaitu perkembangan kerja sama militer antara TNI-AD dan RCAF. Maka tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis lebih jauh tentang bagaimana perkembangan kerja sama militer yang telah dilakukan oleh TNI-AD dan RCAF setelah berjalan selama 28 tahun. Tujuan lain yaitu untuk menganalisis faktor, kepentingan, dan pencapaian apa saja yang menjadikan kerja sama militer antara TNI-AD dan RCAF ini perlu diadakan.

1.4 Manfaat dan Kegunaan Penelitian

Sedangkan manfaat dan kegunaannya diharapkan hasil dari penelitian ini dapat meluruskan persepsi masyarakat umum yang keliru tentang pihak militer Kamboja yang meniru militer Indonesia dari segi seragam sampai dengan simbol baret. Lalu Diharapkan sumbang pemikiran dari peneliti bisa menjadi masukan terhadap pihak TNI dan Pemerintah Indonesia guna mewujudkan satu hubungan bilateral yang lebih efektif juga efisien untuk menciptakan keamanan juga stabilitas kawasan Asia Tenggara.

1.5 Sistematika Penulisan

Hasil penelitian ini terbagi menjadi lima bab yang masing-masing memuat beberapa sub-bab. Pada bab I berisikan Pendahuluan, bab II yaitu Kerangka Berpikir, dilanjut bab III meliputi Metodologi Penelitian, bab IV berisikan bab Hasil dan Pembahasan, dan bab V merupakan Penutup.

Bab I: Latar Belakang

Di dalam bab pertama, penulis mengemukakan mengenai latar belakang dari kerja sama bilateral antara Indonesia dan Kamboja yang telah berlangsung sejak lama. Kerja sama tersebut juga termasuk kerja sama di bidang pertahanan atau militer yang dilakukan sejak terjadinya konflik internal di Kamboja pada tahun 1970-an sampai dengan saat ini.

Di bab pertama ini, penulis juga menjelaskan mengenai rumusan masalah yang ada di dalam penelitian antara lain adalah mengapa kerja sama militer antara TNI-AD dan RCAF perlu diadakan dan apa saja pencapaian utama dari kerja sama militer antara TNI-AD dan RCAF. Selain itu, penulis juga memaparkan tujuan dan kegunaan dari penelitian.

Bab II: Kerangka Berpikir

Pada bab kedua ini, penulis memaparkan beberapa hasil tinjauan pustaka yang kemudian dikelompokkan berdasarkan masing-masing tema mulai dari yang umum menuju tema yang lebih spesifik, yaitu: (i) Kerja sama dalam bentuk organisasi regional, (ii) Kerja sama dalam aspek militer di kawasan, (iii) Kerja sama bilateral antara Indonesia dan Kamboja, (iv) Landasan pemikiran militer Indonesia. Dalam bab ini penulis juga akan menjelaskan teori dan konsep yang digunakan dalam penelitian.

Bab III: Metode Penelitian

Di dalam bab ketiga, penulis memaparkan mengenai metode dan juga teknik yang digunakan. Metode dan teknik penelitian tersebut meliputi pendekatan ilmiah, metode penelitian, teknik pengumpulan data, dan yang terakhir teknik analisis data.

Bab IV: Hasil dan Pembahasan

Bab ini akan menjelaskan jawaban-jawaban dari permasalahan yang telah diajukan di dalam penelitian ini berdasarkan analisis pada data-data yang telah didapat.

Bab V: Penutup

Pada bab ini, penulis akan menutup dengan menguraikan secara menyeluruh dan singkat dari hasil pembahasan masalah yang telah ditemukan dari bab-bab sebelumnya.